

FAKTOR KETERPILIHAN POLITISI PEREMPUAN PETAHANA PDI PERJUANGAN DALAM PEMILU LEGISLATIF KOTA SEMARANG TAHUN 2024

Gharitza Rachel A. Nuhmar
Email: gharitza.rachel@gmail.com

Departemen Politik dan Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro
Jl. Prof. H. Soedarto, SH, Tembalang, Semarang, Kode Pos 1269
Telepon: (024) Faksimile (024) 7465405
Laman: <http://www.fisipundip.ac.id> Email: fisip@undip.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi keterpilihan politisi perempuan petahana dari PDI Perjuangan dalam Pemilu Legislatif Kota Semarang Tahun 2024. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi kasus dan teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam serta dokumentasi. Informan utama dalam penelitian ini adalah tiga politisi perempuan yang berhasil terpilih kembali, yaitu Trifena Weyatin Soehendro, Hanik Khoiru Solikhah, dan Lely Purwandari. Kemudian diperkuat oleh DPC PDI Perjuangan Kota Semarang, KPU Kota Semarang, dan pemilih dari daerah pemilihan terkait. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keterpilihan politisi perempuan dipengaruhi oleh dua faktor utama, yakni faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal mencakup dukungan partai, alokasi sumber daya kampanye, dan pelatihan politik yang diberikan oleh partai. Sementara itu, faktor eksternal meliputi sistem pemilu negara, yakni proporsional terbuka dan desain sistem pemilu internal partai, yakni dipengaruhi sistem komandante. Kemudian, faktor lainnya adalah perilaku pemilih kepada politisi perempuan, serta eksposur media terhadap caleg selama masa kampanye. Ketiganya saling berkelindan membentuk dinamika elektabilitas yang kompleks. Meskipun politisi perempuan petahana memiliki keberuntungan dalam hal popularitas, pun didukung dengan PDI Perjuangan yang menunjukkan komitmen terhadap afirmasi gender, hambatan struktural dan stereotip kultural terhadap perempuan masih menjadi kendala signifikan. Penelitian ini merekomendasikan reformasi internal partai politik beserta seluruh kebijakannya, penguatan regulasi afirmatif pemerintah dan reformasi kultural untuk menciptakan representasi politik yang lebih setara.

Kata Kunci: Keterpilihan, Politisi Perempuan, PDI Perjuangan, Pemilu Legislatif 2024, Kota Semarang

ABSTRACT

This research was conducted to analyze the electability factors of incumbent female politicians from the Indonesian Democratic Party of Struggle (PDI- Perjuangan) in the 2024 Semarang City Legislative Election. This research uses a qualitative approach with case studies and data collection techniques in the form of in-depth interviews and documentation. The main informants in this research are three female politicians who were successfully re-elected, namely Trifena Weyatin Soehendro, Hanik Khoiru Solikhah, and Lely Purwandari. The research was further supported by the PDI Perjuangan Party Branch in Semarang City, the

Semarang City Election Commission, and voters from the relevant electoral districts. The results of this research indicate that the re-election of female politicians is influenced by two main factors: internal factors and external factors. Internal factors include party support, campaign resource allocation, and political training provided by the party. Meanwhile, external factors include the country's electoral system, namely the open proportional system, and the design of the party's internal electoral system, which is influenced by the komandante system. Additionally, other factors include voter behavior toward female politicians and media exposure of candidates during the campaign period. These three factors intertwine to form a complex dynamic of electability. Although incumbent female politicians have the advantage of popularity and are supported by the PDI Perjuangan, which has demonstrated its commitment to gender affirmation, structural barriers and cultural stereotypes against women remain significant obstacles. This research recommends internal reforms of political parties and all their strategic policies, strengthening of affirmative government regulations, and cultural reforms to create more equitable political representation.

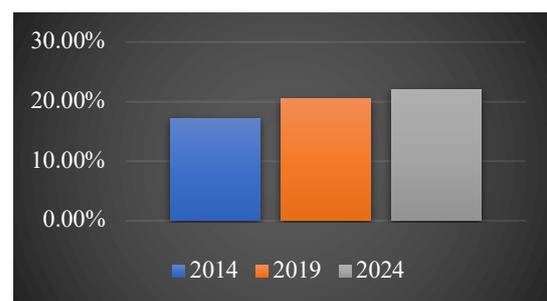
Keywords: *Electability, Female Politicians, PDI Perjuangan, 2024 Legislative Elections, Semarang City*

PENDAHULUAN

Sejak penetapan UU Pemilu No. 10 tahun 2008, pengaturan kuota perempuan dalam daftar calon yang diusulkan partai politik dalam pencalonan tidak hanya sekurang-kurangnya 30%, tetapi juga nomor urut dalam daftar calon setiap tiga nama calon sekurang-kurangnya ada satu perempuan. Meskipun ada kemajuan dalam jumlah kehadiran perempuan di lembaga legislatif, namun perempuan masih menghadapi tantangan besar dalam dunia politik yang didominasi laki-laki. Sebuah studi oleh Mukarom (2008) menunjukkan bahwa perempuan dalam politik mengalami kenaikan tetapi belum mengalami perubahan signifikan, dengan keterwakilan perempuan yang masih rendah di parlemen, masih di bawah 30%.

Berdasarkan data dari BPS Indonesia (2024), sejak tahun 2014 konsisten terjadi peningkatan dalam persentase keterlibatan perempuan di parlemen. Pada tahun 2014, angka keterwakilan perempuan berada pada 17,32% dan meningkat signifikan hingga mencapai 20,52% di tahun 2019. Peningkatan ini terus berlanjut hingga tahun 2024, di mana persentase tersebut naik menjadi 22,14%.

Gambar 1. Persentasi Keterlibatan Perempuan di Perlemen Tahun 2014-2024



Sumber: BPS Indonesia, Tahun 2025

Hal ini menjadi bukti bahwa keterlibatan perempuan dalam politik di Indonesia telah meningkat, yang menandai transisi menuju sistem demokratis yang lebih terbuka dan inklusif. Reformasi ini membuka peluang bagi lebih banyak perempuan untuk terlibat dalam berbagai aspek kehidupan politik, termasuk menjadi anggota legislatif serta berpartisipasi dalam pemerintahan lokal dan nasional. Akan tetapi, realisasi jumlah ini dalam praktiknya masih jauh dari ideal. Perempuan sering kali kurang terwakili dalam posisi kepemimpinan politik, baik di tingkat lokal maupun nasional (Anwar, 2017). Meskipun perempuan hampir setengah dari populasi, persentase mereka dalam posisi pengambil

keputusan politik jauh lebih rendah dibandingkan dengan laki-laki. Tantangan seperti diskriminasi dan bias gender memengaruhi keterpilihan perempuan sebagai kandidat oleh partai politik dan cara mereka diperlakukan oleh media serta masyarakat umum. Stereotip gender dan ekspektasi tentang peran tradisional perempuan sering kali mengurangi peluang mereka untuk terpilih, karena sebagian pemilih merasa kurang yakin dengan kemampuan kepemimpinan perempuan dibandingkan dengan laki-laki (Lestari, 2020).

Sejumlah studi menunjukkan bahwa peningkatan keterwakilan perempuan di parlemen tidak hanya berdampak pada aspek kuantitatif, tetapi juga memperkaya substansi kebijakan publik agar lebih responsif terhadap kebutuhan dan hak-hak perempuan. Hal ini dikarenakan perempuan dapat mewakili golongannya dalam pengambilan proses kebijakan, karena menurut studi oleh Anderson dan Smith pada tahun 2012, tanpa keterwakilan yang memadai, banyak isu yang berkaitan dengan perempuan cenderung terabaikan oleh diskusi yang didominasi oleh laki-laki. Perempuan sebagai legislator juga cenderung membawa perspektif yang lebih inklusif dan sensitif terhadap kebutuhan masyarakat, khususnya isu-isu yang secara langsung mempengaruhi kualitas hidup keluarga dan masyarakat (Nugraha, 2022). Dengan partisipasi aktif perempuan dalam proses legislasi, parlemen menjadi lebih representatif terhadap kebutuhan seluruh populasi, tidak hanya kelompok mayoritas. Dalam suasana politik yang masih didominasi laki-laki, kehadiran perempuan menjadi penting untuk mengangkat isu-isu yang selama ini cenderung terpinggirkan. Menurut Miller, dengan keterwakilan yang lebih baik, suara kelompok yang sebelumnya kurang diperhatikan dapat ikut dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan. Oleh karena itu, keberadaan perempuan di lembaga legislatif tidak

semata soal kesetaraan gender, melainkan juga sebagai strategi untuk menciptakan kebijakan publik yang lebih adil, komprehensif, dan berpihak pada kepentingan masyarakat luas.

Pemilihan Legislatif tahun 2024 di Kota Semarang sebagai momen pemilihan politisi partai yang dapat duduk di kursi parlemen menghadapi dinamika politik yang menarik, terutama terkait dengan fenomena dominasi politisi petahana PDI Perjuangan yang berhasil duduk di parlemen. Pemilu tahun 2024 merupakan tahun berat bagi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dalam pemilu, karena menghadapi berbagai tantangan yang berkaitan dengan dinamika politik internal dan eksternal, perubahan demografis, serta persaingan yang semakin ketat dalam mempertahankan dukungan elektoral. Secara internal, PDI Perjuangan harus mengelola stabilitas partai, termasuk menjaga soliditas di tengah potensi perpecahan akibat perbedaan kepentingan politik di antara kader dan faksi-faksi di dalamnya. Sementara itu, dari sisi eksternal, persaingan antarpartai semakin ketat, dengan meningkatnya kekuatan partai oposisi yang berusaha menarik basis pemilih tradisional PDI Perjuangan.

PDI Perjuangan sebagai partai dominan di Kota Semarang kembali mencalonkan sebagian besar anggota legislatif petahana, baik laki-laki maupun perempuan. Berdasarkan data hasil pemilu KPU Semarang Tahun 2024, dapat dihitung bahwa peluang perempuan untuk terpilih kembali hanya 50%, berbeda dengan laki-laki yang mencapai 69%. Pada pemilu tahun 2019, sebanyak 6 dari 19 politisi yang terpilih adalah perempuan, sedang pada tahun 2024, persentasenya menjadi 3 politisi perempuan dari total 14 politisi yang terpilih. Ketiga politisi perempuan tersebut adalah petahana, yakni Trifena Weyatin Soehendro dari Dapil 1, Hanik Khoiru Solikhah dari Dapil 2, dan Lely Purwandari dari Dapil 3. Rendahnya

jumlah perempuan di DPRD Kota Semarang dikarenakan perempuan sering menghadapi serangkaian hambatan struktural dan kultural yang membatasi kemampuan mereka untuk berpartisipasi secara efektif dalam politik. Hambatan-hambatan ini menghalangi perempuan dalam berperan aktif dalam proses politik secara keseluruhan. Dalam politik Indonesia, perempuan menghadapi hambatan struktural seperti terbatasnya akses terhadap sumber daya penting seperti pendanaan kampanye, yang krusial untuk visibilitas dan efektivitas kampanye mereka. Selain itu, perempuan mengalami

kesulitan dalam memasuki jaringan politik yang sudah ada, yang umumnya didominasi oleh laki-laki dan penting untuk mendapatkan dukungan serta informasi strategis. Perempuan juga mendapatkan liputan media yang lebih sedikit dan terkadang bias, yang memengaruhi persepsi publik tentang kelayakan dan efektivitas mereka sebagai pemimpin (Taylor & Parker, 2022). Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti meneliti dan menganalisis faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi keterpilihan politisi perempuan petahana dari PDI Perjuangan dalam pemilu legislatif Kota Semarang tahun 2024.

TUJUAN PENELITIAN

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis faktor-faktor internal dan eksternal yang memengaruhi keterpilihan politisi perempuan petahana dari PDI Perjuangan pada Pemilu Legislatif Kota Semarang 2024.

KERANGKA TEORITIS

1. Gender dan Politik

Teori gender dan politik tidak hanya mendeskripsikan perbedaan antara laki-laki dan perempuan dari sudut pandang biologis dan sosial, tetapi juga mengkaji struktur kekuasaan yang mempengaruhi keterlibatan politik perempuan. Menurut Marzuki (2015), gender adalah konstruksi sosial yang melahirkan norma, peran, dan ekspektasi tertentu yang berbeda untuk laki-laki dan perempuan. Struktur patriarki ini seringkali memarginalkan perempuan dalam ranah politik dan membatasi akses mereka ke dalam proses pengambilan keputusan politik.

Teori gender dan politik bukan hanya membedakan antara gender sebagai konstruksi sosial dan biologis, tetapi lebih penting lagi, teori ini menjelaskan bagaimana struktur kekuasaan berbasis gender, khususnya patriarki, mempengaruhi partisipasi politik perempuan. Menurut teori ini, patriarki adalah sistem kekuasaan yang memberikan prioritas kepada laki-laki dalam semua aspek kehidupan sosial dan politik, yang pada gilirannya menciptakan hambatan signifikan bagi perempuan yang mencari atau menjabat posisi kepemimpinan politik. Patriarki mendukung norma-norma dan praktik yang menghambat akses perempuan ke dalam arena politik melalui berbagai cara:

- a. Eksklusi Institusional
- b. Bias Sosial dan Kultural
- c. Akses Terbatas pada Sumber Daya

2. Kontestasi dan Kompetisi Politik

Teori kontestasi dan kompetisi politik secara mendalam mengungkap bagaimana struktur dan dinamika dalam politik mempengaruhi partisipasi perempuan. Menurut Robert Dahl (2013) dalam teorinya tentang

Polyarchy, kompetisi politik merupakan elemen esensial dalam demokrasi yang memberikan pemilih kemampuan untuk memilih di antara alternatif yang berbeda. Dalam konteks perempuan, mereka seringkali harus menghadapi stereotip gender dan yang membentuk hambatan signifikan dalam proses politik, baik secara internal, maupun eksternal. Hambatan internal antara lain dukungan partai, sumber daya kampanye, dan pelatihan yang disediakan oleh partai. Sedangkan hambatan eksternal meliputi sistem pemilu, perilaku pemilih, dan liputan media.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yang bertujuan memperoleh gambaran langsung secara holistik dalam memahami bagaimana faktor internal dan eksternal mempengaruhi keterpilihan politisi perempuan. Data dikumpulkan dengan teknik wawancara mendalam dan analisis dokumen. Lokasi penelitian ini adalah di Kota Semarang dengan 13 informan. Politisi petahana PDI Perjuangan menjadi informan kunci dan terdapat informan pendukung seperti DPC PDI Perjuangan Kota Semarang, KPU Kota Semarang, politisi perempuan yang gagal terpilih dan pemilih di masing-masing dapil politisi petahana. Analisis data menggunakan metode reduksi data, kategorisasi, sintesis, penemuan tema, kemudian interpretasi dan kesimpulan. Kualitas data dalam penelitian ini ditingkatkan melalui triangulasi sumber data dan metode.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Faktor Internal

1) Dukungan Partai

Dukungan partai politik merupakan salah satu elemen kunci yang mempengaruhi keterpilihan kandidat dalam pemilu legislatif, termasuk bagi politisi perempuan petahana. Dalam konteks PDI Perjuangan sebagai partai besar dengan struktur yang kuat di Kota Semarang, dukungan institusional yang diberikan partai kepada kader perempuannya memiliki dampak yang signifikan terhadap kemampuan mereka dalam mempertahankan kursi legislatif. Dukungan ini dimulai sejak awal, yakni ketika pemutusan penempatan nomor politisi dalam daftar calon, hingga upaya pemenangan suara.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa para politisi perempuan petahana merasakan dukungan partai dalam berbagai bentuk. Pertama, dalam tahap penjurian, PDI Perjuangan cenderung memberikan peluang yang relatif seimbang kepada seluruh kader, termasuk kader perempuan yang kembali berkontestasi di pemilu legislatif tahun 2024. Secara konkret, dukungan partai terhadap kader perempuannya terlihat dalam penempatan nama dalam Daftar Calon Tetap (DCT). Penempatan ini tentunya bukan sekedar urutan administratif, namun juga memiliki konsekuensi elektoral yang penting, utamanya di tengah sistem pemilu yang digunakan di Indonesia. Sistem penempatan nomor ini penetapan ini diseleksi berdasarkan kriteria tertentu, sesuai Surat Keputusan DPP PDIP No. 210/KPTS/DPP/V/2008. Kriteria dalam menetapkan nomor urut caleg, partai mendasarkan pada:

1. Jabatan calon dalam struktur partai

2. Nilai bobot calon berdasarkan data pendukung
3. Penugasan calon oleh struktur partai
4. Hasil persentase perolehan suara pdi perjuangan pada pemilu sebelumnya.
5. Jumlah pemilih dari daerah yang diwakilinya.

Penempatan caleg dalam nomor urut di daftar calon tersebut merupakan salah satu bentuk dukungan partai yang krusial dalam pemilu. Hal ini bukan hanya mencerminkan komitmen PDI Perjuangan terhadap kebijakan afirmatif gender 30% dengan *zypper system* 3:1, namun juga menentukan posisi strategis caleg perempuan dalam kontestasi politik. Secara nyata ini adalah dukungan partai dengan seadil-adilnya dalam sistem pemilu di Indonesia, dimana nomor urut caleg menimbulkan efek psikologis. Caleg dengan nomor urut atas sering kali diasosiasikan dengan kandidat unggulan, sedang yang dibawahnya secara nyata dianggap tidak lebih baik.

2) Sumber Daya Kampanye

Sumber daya kampanye menjadi aspek internal yang mempengaruhi keterpilihan politisi perempuan. Ketersediaan sumber daya ini menjadi penopang utama bagi keberhasilan seorang caleg dalam menjangkau pemilih dan memperkuat elektabilitas seorang caleg di lapangan. Sumber daya ini mencakup aspek finansial, jejaring sosial, hingga daya jangkauan kampanye. Dalam konteks pemilu legislatif sumber daya kampanye secara signifikan membentuk peran dan ruang gerak yang luwes bagi

politisi di ruang publik, khususnya untuk politisi perempuan.

Aspek finansial atau berarti mandiri secara ekonomi menjadi aspek yang paling krusial dalam membangun strategi kampanye dan meningkatkan kedekatan politisi dengan basis pemilihnya. Politisi petahana PDI Perjuangan di Kota Semarang mengalami tantangan yang sama, di mana mereka terbatas dalam sumber daya kampanye, sehingga berdampak pada bentuk dan efektivitas kampanye. Mereka hanya mencetak alat peraga kampanye yang sederhana namun massif seperti *roundtag* dan tidak menyewa operator atau editor media. Sehingga kampanye yang dilakukan adalah kampanye dengan media konvensional. Tidak ada satu pun politisi petahana perempuan yang berkampanye menggunakan media digital, sehingga kemampuan caleg perempuan dalam menjangkau khalayak luas menjadi sangat terbatas. Dengan metode konvensional, tentunya caleg perempuan menjadi sangat rendah intensitasnya, dikarenakan dilakukan dari satu tempat ke tempat yang lain secara langsung.

Secara lebih luas, keterbatasan sumber daya kampanye ini bukan hanya berpengaruh terhadap peluang kemenangan caleg perempuan, namun juga menciptakan ketimpangan struktural yang memperlemah upaya peningkatan perempuan di legislatif. Tanpa dukungan afirmatif berupa subsidi kampanye, caleg perempuan akan selalu berada di dalam posisi yang kurang kompetitif dibandingkan dengan caleg laki-laki. Dalam jangka panjang, hal ini bisa berdampak pada berkurangnya

minat perempuan untuk terlibat dalam politik elektoral karena tidak mampu menanggung beban ekonomi dan sosial yang melekat dalam proses kampanye. Dengan demikian, keterbatasan sumber daya kampanye ini harus dipandang sebagai tantangan struktural yang perlu dipecahkan dengan solusi sistemik, tidak hanya mengandalkan semangat atau idealisme. Politisi perempuan harus diberikan ruang dan alat yang setara untuk bersaing. Maka, karena hal tersebut, penting bagi partai politik maupun penyelenggara pemilu untuk mulai memikirkan skema pendanaan kampanye yang lebih adil bagi perempuan. Reformasi sistem dukungan kampanye menjadi kunci untuk membuka akses politik yang lebih inklusif dan representatif, agar peluang keterpilihan caleg perempuan benar-benar setara karena mereka mampu bersaing dalam arena politik modern yang semakin kompleks dan kompetitif.

3) Pelatihan oleh Partai

Dalam meningkatkan kapasitas kader perempuan yang maju sebagai caleg, partai politik memiliki peran krusial dalam menyediakan pelatihan yang sistematis. Pelatihan politik ini merupakan instrumen yang sangat penting dalam meningkatkan kualitas kader, baik dari aspek pengetahuan, ketrampilan politik, hingga kemampuan komunikasi publik. Selain dari kemampuan individual politisi itu sendiri yang memiliki daya tarik tinggi seperti tingkat popularitas dan kemampuan politik dari pengalaman dan komunikasi, sehingga menjadi elemen penting dalam kontestasi pemilu, keberadaan partai politik

tetap sangat dibutuhkan guna mengembangkan kapasitas individu. Hal tersebut dikarenakan kemampuan individual tanpa dukungan atau *upgrade* dari partai tidak cukup untuk menjamin keberhasilan dalam perebutan kursi legislatif.

Partai menjadi aktor penting yang memiliki peran strategis untuk membentuk, membina, dan juga mendukung kader-kader politiknya yang maju menjadi caleg agar mampu bersaing secara efektif dalam kontestasi pemilu. Dalam membentuk, membina, pun juga mendukung kader-kadernya diperlukan pelatihan yang sistemik, sebagai salah satu bentuk intervensi partai yang memiliki dampak langsung terhadap penguatan kapasitas politik kader, khususnya perempuan. Pelatihan ini dirancang untuk menguatkan politisi perempuan sedari akarnya, sehingga mereka memiliki bekal yang cukup dalam bentuk pengetahuan, ketrampilan, maupun pemahaman yang dibutuhkan dalam menjalankan fungsi representasi mereka secara efektif. Pelatihan dalam konteks ini tidak hanya sekedar formalitas, namun sebagai “kawah” pembelajaran politik kader perempuan yang memungkinkan mereka untuk memahami politik secara luas dan menyeluruh, dimulai dari mekanisme kerja partai, strategi kampanye yang efektif, teknik komunikasi politik, hingga dinamika elektoral yang kompleks.

Dalam lingkup PDI Perjuangan Kota Semarang, bentuk pelatihan secara periodik dilaksanakan. Pelatihan ini mencakup beberapa aspek seperti pendidikan ideologi dan kepartaian. Sebagai partai yang berbasis

ideologi, PDI Perjuangan secara masif memberikan pencerdasan kepada kadernya terkait penguatan nilai-nilai marhaenisme. Namun, pelatihan ini merupakan pelatihan umum yang diselenggarakan untuk politisi laki-laki maupun perempuan. Tidak ada forum yang disediakan DPC partai politik yang sedari awal digunakan untuk menjawab tantangan substantif yang dihadapi perempuan secara periodik. Meskipun DPC PDI Perjuangan tidak memiliki pelatihan khusus perempuan, kader perempuan DPC PDI Perjuangan tetap dibekali pemahaman-pemahaman terkait politik keperempuanan. Pemahaman tersebut didapatkan ketika kader perempuan dikirim mewakili Kota Semarang dalam pelatihan khusus perempuan bernama Pelatihan Kader Khusus Perempuan.

Selain pelatihan yang dilaksanakan dalam bentuk materi formal, PDI Perjuangan Kota Semarang melakukan pelatihan lain guna membangun kohesi struktural dan penguatan dukungan tim lapangan. Pelatihan ini berbentuk pertemuan semacam rapat koordinasi atau kegiatan temu kader. Pertemuan tersebut sering disebut dengan konsolidasi. Konsolidasi internal secara periodik dilakukan dalam momen pemilu melalui rapat Dewan Pimpinan Cabang (DPC). Dalam konsolidasi tersebut, partai melakukan evaluasi berkala terhadap perkembangan kampanye, efektivitas komunikasi politik serta *feedback* masyarakat. Konsolidasi ini efektif membangun respon yang responsif terhadap masalah yang terjadi.

Konsolidasi tersebut sekaligus sebagai sarana melatih kerja tim pun juga membangun semangat kolektif dalam memenangkan pemilu. Pun dalam pelaksanaannya para caleg diasah aspek kepemimpinannya dan ketegasannya dalam mengambil keputusan lapangan. Kegiatan konsolidasi ini pun tidak berhenti di tataran teknis, namun juga menyentuh aspek strategeis melalui forum evaluasi yang reflektif. Forum ini dimanfaatkan untuk mendiskusikan kendala di lapangan, sehingga resistensi masyarakat, lemahnya logistik, maupun masalah internal lainnya seperti tim yang kurang solid dapat diselesaikan dengan dialog terbuka. Konsolidasi ini tidak hanya bertujuan memperbaiki strategi namun juga untuk menjaga moral para kader, utamanya kader perempuan agar tetap konsisten dan perjuangan politik.

B. Faktor Eksternal

1) Sistem Pemilu

Sistem pemilihan umum (pemilu) merupakan kerangka institusional yang menentukan bagaimana suara masyarakat dikonversi menjadi kursi di lembaga legislatif. Sistem ini tidak bahaya sebatas mengatur mekanisme pemilihan, namun juga membentuk struktur politik yang insentif bagi partai, kandidat, maupun pemilih. Dalam konteks negara Indonesia, sistem pemilu yang digunakan adalah sistem proporsional terbuka dengan *zypper system* 3:1 yang diterapkan sejak Pemilu 2009. Penerapan sistem ini telah membawa implikasi yang relatif besar terhadap dinamika representasi politik, termasuk di

dalamnya representasi perempuan di parlemen. Sistem ini berperan dalam memfasilitasi maupun menghambat keterpilihan politisi, khususnya yang perempuan.

Sistem proporsional terbuka adalah sistem dimana masyarakat sebagai pemilih memberikan suara langsung kepada calon legislatif, bukan hanya kepada partai politik. Dalam sistem ini, caleg yang memperoleh suara terbanyak akan menempati kursi legislatif sesuai dengan alokasi kursi yang dimenangkan partai politik di daerah pemilihan. Secara sistem, sistem proporsional terbuka ini memiliki kelebihan dalam peningkatan akuntabilitas publik calon kepada pemilih. Pemilih memiliki kontrol yang lebih besar terhadap siapa yang akan mewakili mereka. Namun, sistem ini juga memiliki kekurangan, yakni secara internal partai, sistem ini menghadirkan problem distribusi suara yang tidak merata antar caleg, sehingga memunculkan kompetisi internal yang intens.

Dalam konteks keterwakilan perempuan, sistem proporsional terbuka ini menyimpan tantangan tersendiri. Meskipun secara normatif sistem ini memberikan ruang kepada pemilih untuk memilih langsung calon legislatif yang mereka anggap layak, sistem ini membawa sejumlah problem struktural dan konsekuensinya sangat signifikan terhadap dinamika politik, khususnya terkait keterpilihan politisi perempuan. Problem ini terkait distribusi suara yang tidak merata dan persaingan internal antar kandidat dalam satu partai.

Selain sistem pemilu yang diterapkan oleh Komisi Pemilihan Umum, sistem internal partai secara signifikan sangat mempengaruhi

keterpilihan politisi PDI Perjuangan di Kota Semarang. Pada pemilu legislatif tahun 2024, PDI Perjuangan menggunakan sistem pemenangan strategis baru kepada para caleg di seluruh daerah Provinsi Jawa Tengah kecuali wilayah Solo dan Boyolali, karena berbeda dinamika wilayahnya dan dikenal telah memiliki struktur akar rumput yang solid. Dukungan strategis tersebut disebut sistem komandante. Sistem komandante di PDI Perjuangan Jawa Tengah secara formal diatur dalam Peraturan Partai Nomor 1 Tahun 2023 yang diterbitkan oleh DPD PDI Perjuangan Jawa Tengah, sehingga memiliki dasar legal formal di dalam struktur organisasi partai. Strategi ini merupakan model kerja politik berbasis wilayah yang menggabungkan unsur pengorganisasian kader dan pendistribusian tanggung jawab elektoral secara lebih konkret kepada para calon legislatif.

Sistem komandante dirancang untuk membagi wilayah pemilihan ke dalam satuan yang lebih kecil, yakni berbasis kelurahan, yang kemudian ditugaskan kepada seorang kader atau caleg sebagai penanggung jawab utamanya, yang kemudian disebut komandante. Caleg memiliki tanggung jawab penuh untuk mengelola, mengonsolidasi, serta memastikan pergerakan dukungan di wilayah tersebut. Sistem komandante ini mulai diterapkan menjelang masa kampanye pemilu 2024, dengan proses penguatan struktur dan sosialisasi dimulai sejak pertengahan tahun 2022. Tahapan awal persiapan implementasi sistem komandante ini adalah dengan pelatihan kader dan pemetaan wilayah setelah sebelumnya

dilakukan sosialisasi. Pemetaan wilayah sendiri dibagi menjadi 3-4 kelurahan, namun juga ada yang sampai 8 kelurahan, hal ini bergantung pada Daftar Pemilih Tetap dari kelurahan tersebut.

Secara nyata, sistem komandante ini juga bertujuan untuk menghindari fragmentasi suara akibat kompetisi internal antar kandidat. PDI Perjuangan berharap bahwa sistem komandante ini dapat meningkatkan efektivitas kerja politik dan menghindari tumpang tindih wilayah kampanye antar kandidat internal. Namun, berdasarkan temuan di penelitian ini, sistem komandante ini tidak sepenuhnya berjalan efektif di lapangan. Salah satu persoalan utama yang muncul ialah waktu implementasi yang terlalu singkat, yakni hanya sekitar dua tahun sejak persiapan awal. Dalam konteks kerja politik, waktu dua tahun dinilai belum cukup untuk melakukan konsolidasi struktural secara menyeluruh, utamanya bagi caleg baru atau caleg petahana yang wilayah kampanyenya berubah signifikan akibat penugasan sistem komandante. Pembatasan wilayah kampanye yang semula luas menjadi hanya beberapa kelurahan tertentu juga berdampak signifikan pada basis suara yang selama ini telah dibangun melalui kerja politik jangka panjang. Secara teoritis, sistem ini efektif apabila diterapkan pada caleg yang memiliki basis dukungan yang terkonsentrasi di suatu wilayah tertentu. Melalui skema ini, upaya kampanye menjadi lebih terukur, logistik dapat difokuskan, dan hasilnya menjadi lebih mudah dimonitor oleh partai. Namun demikian, efektivitas sistem komandante menjadi problematis ketika diterapkan pada caleg yang memiliki pola penyebaran suara

tidak terfokus atau lintas wilayah. Temuan di lapangan menunjukkan bahwa sistem komandante justru menimbulkan kerugian elektoral bagi caleg perempuan yang memiliki sebaran suara luas. Salah satu contohnya dapat dilihat dalam perolehan suara dari politisi perempuan dari Dapil 2 Kota Semarang, yakni Dyah Ratna Harimurti.

Tabel 1. Perolehan Suara Dyah Ratna Harimurti dalam Pemilu Legislatif Kota Semarang

Tahun	Kecamatan		
	Gayamsari	Genuk	Pedurungan
2019	1457	2268	5899
2024	493	1318	4368

Sumber: KPU Kota Semarang, 2024

Sistem ini secara signifikan menyebabkan dinamika yang hebat. Dimana Dyah Ratna Harimurti, politisi perempuan dari Dapil 02 Kota Semarang menjadi kehilangan suara lebih dari 35%, yakni dari 9624 suara di pileg tahun 2019 menjadi 6179 suara di pileg tahun 2024. Sistem komandante mampu membuat keadaan ini berbalik dikarenakan sistemnya mengatur hingga mekanisme hitung suara oleh internal partai. Dampak dari sistem ini cukup serius dalam pemilu legislatif Kota Semarang tahun 2024 kemarin, yakni mengurangi efektivitas kampanye caleg perempuan, merusak basis suara loyal yang sudah dibangun sebelumnya, dan menciptakan ketidakpercayaan di kalangan pemilih terhadap mekanisme internal partai. Sehingga pada akhirnya, sistem komandante yang dibuat guna memperkuat kemenangan justru menjadi faktor yang melemahkan keterpilihan caleg, utamanya perempuan yang tidak berada dalam wilayah prioritas.

2) Perilaku Pemilih

Perilaku pemilih merupakan salah satu faktor eksternal dalam menentukan keterpilihan seorang calon legislatif, termasuk di dalamnya caleg yang perempuan. Perilaku ini tentunya tidak terbentuk secara rasional dan ilmiah semata, namun dibentuk oleh interaksi kompleks antara pengalaman, informasi, nilai budaya, serta eksposur terhadap kampanye politik. Dalam konteks pemilu legislatif di Kota Semarang, perilaku pemilih terhadap calon perempuan masih sering kali dibentuk oleh bias gender. Selain hal tersebut, menurut temuan penulis di lapangan, dalam pemilu legislatif Kota Semarang tahun 2024, perilaku pemilih turut dibentuk oleh dinamika politik elektoral yang pragmatis, termasuk didalamnya intervensi bantuan sosial (bansos) yang digunakan sebagai alat kampanye terselubung.

Kondisi ini menandakan rendahnya literasi politik di tingkat akar rumput, serta menguatnya pola pikir pragmatis yang mempengaruhi kekuasaan perilaku dalam menentukan pilihan politik. Di samping itu, para politisi tetap menemui bias gender, meski pun pemahaman politik masyarakat Kota Semarang sudah meningkat, hal ini tetap menjadi tantangan yang signifikan. Beberapa bias umum yang muncul antara lain:

a. Stereotip Kepemimpinan

Dalam temuan penelitian ini, masih terdapat pandangan kuat di tengah masyarakat Kota Semarang bahwa laki-laki lebih layak memimpin dibanding dengan perempuan. Pandangan ini bukan hanya berdasar pada preferensi personal, melainkan

hasil dari konstruksi sosial yang beroperasi sejak ratusan tahun lalu, di mana laki-laki dianggap sebagai sosok yang lebih rasional, tegas, dan mampu mengambil keputusan penting di ruang publik. Sebaliknya, perempuan sering kali dipersepsikan sebagai pribadi yang emosional, kurang tegas, dan lebih cocok mengelola urusan domestik, sehingga dianggap tidak ideal untuk menempati pos-pos strategis dalam politik.

b. Peran Ganda

Perempuan sampai hari ini masih dibebani tanggung jawab domestik yang melekat kuat akibat konstruksi peran gender dalam masyarakat. Tugas-tugas seperti mengurus rumah tangga, merawat anak, hingga menjadi penanggung jawab utama atas urusan keluarga sering kali tetap menjadi beban utama yang harus dipikul oleh perempuan, bahkan ketika ia telah masuk dalam dunia politik. Hal ini menyebabkan munculnya ekspektasi ganda terhadap politisi perempuan. Mereka dituntut untuk menjalankan peran tradisional sebagai istri atau ibu yang “ideal” di ranah domestik, namun di sisi lain, mereka juga harus memenuhi tuntutan profesional sebagai anggota legislatif yang produktif, responsif, pun turut hadir dalam dinamika politik yang penuh tantangan.

Berbeda dengan laki-laki yang secara kultural dianggap lebih cocok untuk bekerja di ranah publik, perempuan dihadapkan pada dilema antara tanggung jawab rumah tangga dan tanggung jawab politik. Laki-laki umumnya tidak

dibebani pertanyaan seputar bagaimana mereka membagi waktu antara pekerjaan dan keluarga, mereka dianggap wajar jika sepenuhnya fokus pada tugas profesional. Sebaliknya, politisi perempuan kerap kali dinilai tidak cukup baik jika mereka terlihat terlalu fokus pada karier politiknya dan dianggap mengabaikan peran domestiknya.

- c. Validasi Kultural dan Agama
- Beberapa pemilih yang konservatif menyandarkan pilihannya pada interpretasi agama dan budaya yang menempatkan laki-laki sebagai pemimpin alamiah. Dalam konteks ini, kepemimpinan tidak semata-mata dipahami sebagai kapasitas atau kemampuan individu, tetapi dilekatkan pada identitas gender yang diasumsikan telah ditetapkan secara kodrati. Laki-laki dianggap lebih layak memimpin karena mereka diyakini memiliki tanggung jawab spiritual dan sosial yang lebih besar dalam struktur masyarakat, sebagaimana dipahami melalui lensa tafsir keagamaan maupun norma budaya tradisonal.

Pandangan semacam ini menjadi salah satu faktor yang memperkuat dominasi laki-laki dalam dunia politik. Bagi sebagian pemilih, memilih calon legislatif perempuan dianggap bertentangan dengan prinsip-prinsip religius yang mereka yakini. Hal ini berpengaruh signifikan terhadap pola dukungan politik di masyarakat yang religius dan cenderung konservatif, di mana pertimbangan keimanan bisa

lebih kuat daripada rekam jejak calon.

3) Liputan Media

Media massa merupakan salah satu pilar penting dalam proses demokrasi dikarenakan berfungsi sebagai penyampai informasi, pembentuk opini publik, pun juga sebagai penentu arah wacana politik. Dalam konteks pemilu legislatif, media berperan sebagai pembentuk opini atau persepsi masyarakat pemilih kepada calon legislatif, khususnya caleg perempuan. Oleh karena hal tersebut, cakupan media dalam meliput politisi perempuan menjadi aspek strategis yang menentukan peluang keterpilihan mereka. Secara khusus berarti bagaimana media merespons pencalonan politisi perempuan, bagaimana meresponnya, dan bagaimana dampaknya terhadap persepsi masyarakat.

Dalam penyelenggaraan pemilu legislatif tahun 2024, terdapat dua jenis media yang memiliki peran besar, yakni media konvensional seperti surat kabar, propaganda cetak, maupun sorotan secara langsung. Media yang kedua adalah media baru, seperti platform digital dan media sosial. Di Kota Semarang, media lokal maupun media sosial juga digunakan walaupun tidak dalam skala masif untuk membentuk persepsi publik terkait caleg. Namun, khususnya untuk caleg perempuan, mereka seringkali tidak menggunakan karena dipengaruhi oleh faktor modal

dan jaringan. Kondisi ini turut membentuk tantangan yang dihadapi perempuan yang umumnya memiliki keterbatasan sumber daya. Caleg dengan keterbatasan sumber daya kampanye kesulitan dalam mengakses media, sedang caleg dengan dukungan finansial yang lebih kuat dinilai lebih mampu membayar slot iklan di media sosial atau pun membangun relasi dengan jurnalis.

Media arus utama dapat merepresentasikan politisi perempuan dalam dua pola utama. Pertama, mereka dapat menonjolkan prestasi atau rekam jejak sebagai pemberitaan positif, kemudian yang kedua adalah kecenderungan mengangkat aspek-aspek personal, seperti status keluarga, penampilan fisik, atau kedekatan dengan tokoh-tokoh berpengaruh. Pemberitaan ini acap kali kerap menempatkan caleg perempuan dalam posisi simbolik. Alih-alih mengangkat program atau agenda politiknya, media sering kali menyoroti sisi feminin mereka.

Oleh karena hal tersebut, penting pula mengembangkan strategi khusus untuk merespon pemberitaan, yakni dengan mengedukasi konstituen agar memahami rekam jejak politisi perempuan, bukan hanya percaya pada pemberitaan yang belum tentu benar kebenarannya. Strategi ini menunjukkan bahwa meskipun media kadang bias, caleg perempuan tidak pasif. Mereka mencari cara untuk tetap eksis di ruang publik dan menentang

narasi dominan yang tidak berpihak.

Oleh karena hal tersebut, media sejatinya memiliki peran yang besar dalam menentukan visibilitas dan persepsi masyarakat pemilih terhadap calon. Media pun menciptakan ruang baru untuk membangun relasi antara caleg dengan pemilih, pun juga memperjuangkan representasi yang lebih setara. Diperlukan dorongan kepada media untuk lebih adil dalam pemberitaan, sekaligus diperlukan dorongan kepada caleg perempuan untuk terus aktif mengelola media sebagai instrumen demokratisasi.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis hasil penelitian yang meliputi wawancara dan dokumentasi, hasil penelitian menunjukkan bahwa keterpilihan politisi perempuan petahana dari PDI Perjuangan dalam pemilu legislatif Kota Semarang tahun 2024 tidak ditentukan oleh satu variabel tunggal, melainkan merupakan hasil interaksi kompleks antara faktor internal dari partai politik dan faktor eksternal yang berasal dari luar kendali partai politik.

Dari sisi internal, PDI Perjuangan telah menunjukkan komitmen terhadap keterwakilan perempuan, baik melalui pemenuhan kuota minimal 30% dalam daftar calon legislatif maupun penguatan kapasitas kader perempuan melalui pelatihan politik. Namun, komitmen tersebut belum sepenuhnya menyentuh aspek strategis yang menentukan keberhasilan kontestasi politik elektoral. Penempatan nomor urut yang kurang kompetitif serta distribusi logistik dan sumber daya kampanye yang belum merata masih menjadi tantangan utama. Dalam praktiknya, komitmen afirmatif yang ditampilkan partai sering kali bersifat

simbolik dan belum mampu mendorong peningkatan angka keterpilihan secara signifikan.

Salah satu strategi pemenangan suara yang digunakan oleh PDI Perjuangan, yakni sistem komandante, mekanisme pengorganisasian pemilih secara terstruktur melalui pembagian wilayah tempur dan dipimpin oleh seorang komandante, meski secara konsep dirancang untuk membangun komunikasi dua arah antara caleg dan pemilih, memperkuat basis dukungan akar rumput, serta menciptakan penggalangan suara yang lebih konsisten dan terukur, dalam kenyataannya tidak berjalan sebagaimana mestinya. Tidak maksimalnya pemahaman dari caleg sendiri hingga struktur paling bawah, beserta lemahnya kontrol terhadap sistem komandante membuat strategi ini menjadi tidak efektif. Bahkan dalam beberapa kasus, sistem komandante ini menghilangkan basis pemilih tradisional caleg sebelumnya dan menimbulkan sentimen negatif pemilih terhadap sistem internal partai yang dianggap mencederai demokrasi. Alih-alih memberdayakan caleg perempuan, sistem komandante dalam pelaksanaannya justru mengukuhkan dominasi struktur lama yang tidak berpihak pada kesetaraan elektoral.

Dari sisi eksternal, politisi perempuan menghadapi serangkaian hambatan struktural dan kultural yang saling berkaitan dan saling mempengaruhi. Pertama, sistem pemilu di Indonesia yang menggunakan metode proporsional terbuka menuntut caleg perempuan untuk bersaing secara personal dalam memperoleh suara terbanyak. Sistem ini cenderung menguntungkan kandidat yang memiliki sumber daya dan jaringan kampanye yang luas, dimana dalam banyak kasus lebih mudah diakses oleh laki-laki. Caleg perempuan dengan seluruh keterbatasannya masuk dalam arena kompetisi politik yang tidak setara, yang mengakibatkan meski ia masuk dalam daftar calon, ia tetap tereduksi oleh beban sistemik yang tidak berpihak.

Kemudian, persepsi pemilih yang dioperasikan pun juga dipengaruhi oleh banyak

stimulan, seperti politisasi bansos dan pandangan konservatif. Hal ini menunjukkan bahwa representasi perempuan dalam politik tidak hanya terbentur oleh aspek struktural, namun juga secara kultural yang membentuk dasar preferensi politik pemilih. Terakhir, hambatan juga datang dari minimnya cakupan media terhadap politisi perempuan. Dalam penelitian ini ditemukan bahwasannya caleg perempuan hampir tidak mendapatkan eksposur media. Jikapun ada, skalanya sangat terbatas. Padahal, dalam sistem pemilu terbuka yang menuntut popularitas, visibilitas media menjadi elemen penting dalam membangun dukungan elektoral. Ketimpangan ini membuat politisi perempuan semakin terpinggirkan dari ruang publik, pun juga menghambat elektabilitas yang kemudian beresiko melemahkan posisi caleg perempuan dalam narasi politik lokal.

Dari keseluruhan temuan, tampak bahwa angka keterpilihan politisi perempuan dari PDI Perjuangan di Kota Semarang mengalami penurunan sebanyak 50%. Jika pada tahun 2019 terdapat enam politisi perempuan, maka pada tahun 2024 hanya tiga yang terpilih, dan ketiganya adalah petahana dengan keunggulan memiliki basis pemilih sebelumnya (*existing voter base*).

SARAN

Melihat temuan-temuan di atas, maka diperlukan perbaikan menyeluruh dari hulu ke hilir. Penulis mengajukan saran sebagai berikut:

1. Reformasi Internal Partai Politik

Partai politik perlu melakukan reformasi internal yang mencakup perbaikan dalam hal distribusi sumber daya kampanye yang lebih adil bagi calon legislatif perempuan. Selain itu, pemetaan strategis dalam penempatan nomor urut harus mempertimbangkan

- potensi elektoral; bukan sekedar kedekatan struktural. Penguatan jaringan internal partai juga perlu diarahkan secara inklusif agar dapat mengakomodasi caleg perempuan, khususnya mereka yang memiliki pola dukungan lintas wilayah yang kerap tidak terjangkau oleh pola kerja struktural partai yang kaku.
2. **Evaluasi Sistem Komandante**
Sistem komandante sebagai salah satu strategi internal partai perlu dievaluasi secara mendalam. Meskipun secara teori sistem ini dapat memperkuat basis suara, dalam praktiknya sistem ini hanya efektif bagi caleg yang memiliki konsentrasi suara dalam satu wilayah. Bagi caleg perempuan yang cenderung memiliki pola dukungan yang tersebar, sistem ini justru tidak adaptif dan dapat merugikan. Oleh karena hal tersebut, perlu dilakukan penyesuaian mekanisme kerja komandante agar lebih fleksibel dan mampu menjangkau model dukungan yang beragam.
 3. **Penguatan Regulasi Afirmatif oleh Pemerintah**
Pemerintah perlu memperkuat kebijakan afirmatif yang telah ada dengan menambah pengawasan yang lebih ketat. Upaya afirmasi seperti kuota 30% keterwakilan perempuan tidak boleh berhenti pada pemenuhan administratif semata, tetapi harus diiringi dengan strategi konkret untuk meningkatkan keterpilihan. Pengawasan oleh lembaga seperti KPU dan Bawaslu juga perlu diperluas agar menyentuh aspek substansi dan *outcome* dari kebijakan afirmatif tersebut.
 4. **Perubahan Narasi Media**
Media massa memiliki peran penting dalam membentuk persepsi publik terhadap politik perempuan. Oleh karena itu, perlu ada perubahan dalam konstruksi narasi media, dari yang bersifat simbolik atau stereotipikal menuju pemberitaan yang lebih substantif dan adil gender. Narasi pemberitaan hendaknya difokuskan pada kapasitas politik, pengalaman, serta visi misi caleg perempuan, bukan pada atribut biologis atau peran domestik yang justru mempersempit makna partisipasi politik perempuan.
 5. **Peningkatan Literasi Politik Masyarakat**
Masyarakat sebagai pemilih memiliki peran penting dalam menentukan arah demokrasi. Untuk itu, peningkatan literasi politik menjadi hal yang sangat mendesak. Masyarakat harus didorong untuk menjadi pemilih yang kritis dan memahami pentingnya representasi yang setara. Pendidikan pemilih yang berkelanjutan dan berbasis kesadaran kolektif akan menjadi kunci untuk melawan politik transaksional dan membentuk demokrasi yang lebih sehat dan inklusif terhadap perempuan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anderson, T., & Brown, M. (2015). Peran Perempuan dalam Proses Legislasi: Studi Komparatif. Jakarta: Pustaka Demokrasi.
- Anderson, T., & Green, S. (2022). Kebijakan Afirmatif untuk Kesetaraan Gender dalam Politik. Yogyakarta: Gema Ilmu.

- Anderson, T., & Smith, L. (2012). *Gender dalam Politik Kontemporer: Perspektif Global*. Bandung: Pustaka Media.
- Anwar, F. (2017). *Tantangan Perempuan dalam Dunia Politik di Indonesia*. Surabaya: Inovasi Press.
- Charmaz, K. (2014). *Constructing Grounded Theory*. Sage Publications.
- Creswell, J. W. (2015). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. Sage Publications.
- Dahl, R. A. (2013). *Polyarchy: Participation and Opposition*. Yale University Press.
- Davis, K., & Green, R. (2020). *Kebijakan Responsif Gender dalam Pemerintahan Lokal*. Jakarta: Mitra Pustaka.
- Downs, A. (1957). *An Economic Theory of Democracy*. Harper and Row.
- Hidayat, A., & Sari, M. (2014). *Kesetaraan Gender dalam Politik Indonesia*.
- Johnson, R., & Brown, S. (2018). *Perempuan di Parlemen: Tantangan dan Strategi Kampanye*. Yogyakarta: Gema Demokrasi.
- Johnson, R., & White, P. (2018). *Media dan Keterwakilan Perempuan dalam Politik*. Jakarta: Media Nusantara.
- Kitschelt, H., & Wilkinson, S. I. (2007). *Patrons, Clients, and Policies: Patterns of Democratic Accountability and Political Competition*. Cambridge University Press.
- Lawless, J. (2012). *Becoming a Candidate: Political Ambition and the Decision to Run for Office*. Cambridge University Press.
- Lee, J., & Johnson, S. (2017). *Politik Gender dan Kekuasaan di Asia Tenggara*. Bandung: Karya Ilmiah.
- Lestari, D. (2020). "Stereotip Gender dalam Politik Lokal: Studi Komparatif Partai Besar di Indonesia." Jakarta: Pustaka Publik.
- Miller, D. (2017). *Kebijakan Gender dalam Sistem Legislatif: Teori dan Praktik*. Bandung: Literasi Demokrasi.
- Miller, D., & Davis, K. (2020). *Representasi Perempuan dalam Parlemen Indonesia*. Jakarta: Pustaka Demokrasi.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. Sage Publications.
- Norris, P. (2004). *Electoral Engineering: Voting Rules and Political Behavior*. Cambridge University Press.
- Parker, M. (2019). *Isu Gender dalam Kebijakan Pemerintahan: Studi Kasus Indonesia*. Jakarta: Media Bangsa.
- Phillips, A. (1995). *The Politics of Presence*. Clarendon Press.
- Putri, A., & Nugroho, T. (2015). *Kesetaraan Gender dalam Kebijakan Politik Nasional*. Jakarta: Karya Demokrasi.
- Siregar, Wahidah Zainab. (2019). *Representasi Perempuan dalam Pemberitaan Politik: Analisis*

Narasi Media terhadap Caleg Perempuan pada Pemilu 2019. Jurnal Perempuan dan Media, 7(2), 101-114.

- Smith, K., & Johnson, P. (2022). Politik Inklusif di Asia Tenggara: Sebuah Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta: Reformasi Media.
- Smith, K., & Lee, J. (2023). Partisipasi Perempuan dalam Politik Lokal: Studi Kasus Asia Tenggara. Jakarta: Media Demokrasi.
- Smith, K., & Taylor, S. (2016). Stereotip Gender dalam Sistem Politik Indonesia. Bandung: Demokrasi Press.
- Stokes, S. C. (2005). Perverse accountability: A Formal Model of Machine Politics with Evidence from Argentina. *American Political Science Review*, 99(3), 315-325.
- Susanti, R. (2018). Dinamika Politik Perempuan dalam Kebijakan Pemerintahan. Jakarta: Inovasi Press.
- Taylor, K., & Parker, M. (2022). Kesetaraan Gender dan Pengambilan Keputusan dalam Pemerintahan. Bandung: Media Publik.